



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk keluarga berencana.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan wujud implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama Tahun Anggaran 2025.

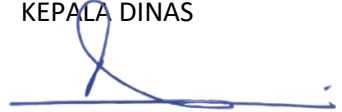
Laporan ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja yang terukur. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.

Melalui penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan kinerja organisasi di masa yang akan datang agar lebih efektif, efisien, dan

berorientasi pada hasil.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Pangkalpinang, Maret 2026
KEPALA DINAS



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
NIP. 19660504 199512 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinas P3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)”

Diukur dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, penilaian RB tidak lagi dilakukan pada level perangkat daerah sehingga indikator ini tidak ditetapkan target khusus pada tahun 2025.

2. Capaian Sasaran Strategis 2

“Meningkatnya Peran Aktif Perempuan dalam Kehidupan Ekonomi dan Politik”

Diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),
Formulasi

Perhitungan:

$$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-des)}{3}$$

- Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (empat)

Program, yakni Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 58,24%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 71,07%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 122,03%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 58,22% terjadi peningkatan sebesar 12,85%.

3. Capaian Sasaran Strategis 3

“Meningkatnya Pemenuhan Hak terhadap Anak”

Diukur dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA),

Formulasi

Perhitungan:

$$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$$

- Capaian indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pemenuhan Hak Anak serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 67,67%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 69,82%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 103,18%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 60,99% terjadi peningkatan sebesar 8,93%.

4. Capaian Sasaran Strategis 4

“Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak”

Diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), Formulasi Perhitungan :

$$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$$

- Capaian indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Perlindungan Khusus Anak serta Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 74,64%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 81,06%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 108,60%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 79,05% terjadi peningkatan sebesar 2,01%.

5. Capaian Sasaran Strategis 5

“Menurunnya Angka Kelahiran Total”

Diukur dengan indikator Total Fertility Rate (TFR), Formulasi Perhitungan:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFRi$$

- Capaian indikator Total Fertility Rate (TFR) dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 3 (tiga) Program, yakni Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks).
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 2,32%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 2,16%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 103,14%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 2,18% terjadi peningkatan sebesar 0,02%.

6. Capaian Sasaran Strategis 6

“Meningkatnya Cakupan Administrasi Kependudukan”

Diukur dengan indikator Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan, Formulasi Perhitungan :

- Capaian indikator Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (empat) Program, yakni” Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,85%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi

83,53%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 102,05%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 95,38% terjadi penurunan sebesar 11,85%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan (IDG)

Tantangan:

- Peningkatan capaian IDG sudah tinggi, namun belum diikuti pemerataan kualitas partisipasi perempuan di seluruh wilayah dan sektor strategis.
- Representasi perempuan masih dominan pada level partisipatif, belum optimal pada level pengambil keputusan (decision maker).

Permasalahan:

- Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi produktif.
- Budaya dan norma sosial yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik.
- Belum optimalnya integrasi program lintas sektor dalam pengarusutamaan gender.

2. Pemenuhan dan Perlindungan Anak (IPHA & IPKA)

Tantangan:

- Capaian indikator meningkat, namun kompleksitas kasus anak (kekerasan, eksploitasi, dll.) juga meningkat.
- Dibutuhkan sistem perlindungan anak yang responsif, cepat, dan terintegrasi.

Permasalahan:

- Sistem layanan perlindungan anak belum sepenuhnya terintegrasi antar lembaga.
- Keterbatasan SDM pendamping dan tenaga profesional.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak anak.

3. Pengendalian Penduduk (TFR)

Tantangan:

- Target TFR tercapai, namun keberlanjutan penurunan angka kelahiran perlu dijaga secara konsisten.
- Perubahan pola pikir generasi muda terhadap keluarga berencana menjadi faktor kunci.

Permasalahan:

- Masih adanya kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan KB.
- Pengetahuan dan kesadaran terhadap program KB belum merata.
- Ketimpangan akses layanan KB antar wilayah.

4. Administrasi Kependudukan

Tantangan:

- Capaian meningkat, tetapi terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, menunjukkan adanya gap pelayanan.
- Transformasi menuju layanan digital belum sepenuhnya

optimal.

Permasalahan:

- Infrastruktur dan sistem layanan digital belum terintegrasi secara penuh.
- Kualitas pelayanan belum merata di seluruh kabupaten/kota.
- Masih adanya masyarakat yang belum tertib administrasi kependudukan.

5. Tata Kelola dan Sistem Kinerja

Tantangan:

- Perubahan kebijakan nasional (evaluasi RB tidak lagi di level OPD) menyebabkan ketidakjelasan indikator pengukuran internal.

Permasalahan:

- Perlu penyesuaian indikator kinerja yang lebih relevan dan terukur.
- Integrasi data kinerja dan sistem informasi belum optimal.
- Belum maksimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan.....	11
1.3 Isu-isu Strategis	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.....	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan 2025	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun 2025	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikas Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel I.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025	15
Tabel II.1 Sasaran Strategis PD ...Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	17
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	18
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3ACSKB Tahun 2025	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel III.3 Pengukuran Capaian Sasaran 1	24
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja	25
Tabel III.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	27

Daftar Gambar

Gambar I.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
Gambar II.1. Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung....	10
Gambar II.2. Layanan Pengaduan Melalui Website PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

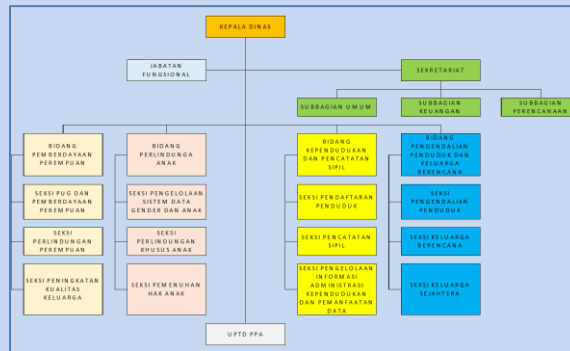
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

“STRUKTUR ORGANISASI”



Ket : Struktur Organisasi lengkap dapat dilihat melalui link :


https://drive.google.com/file/d/1C_xpNv4W4d2GVQRVSXJgBEUqNyqXDTSG/view?usp=sharing

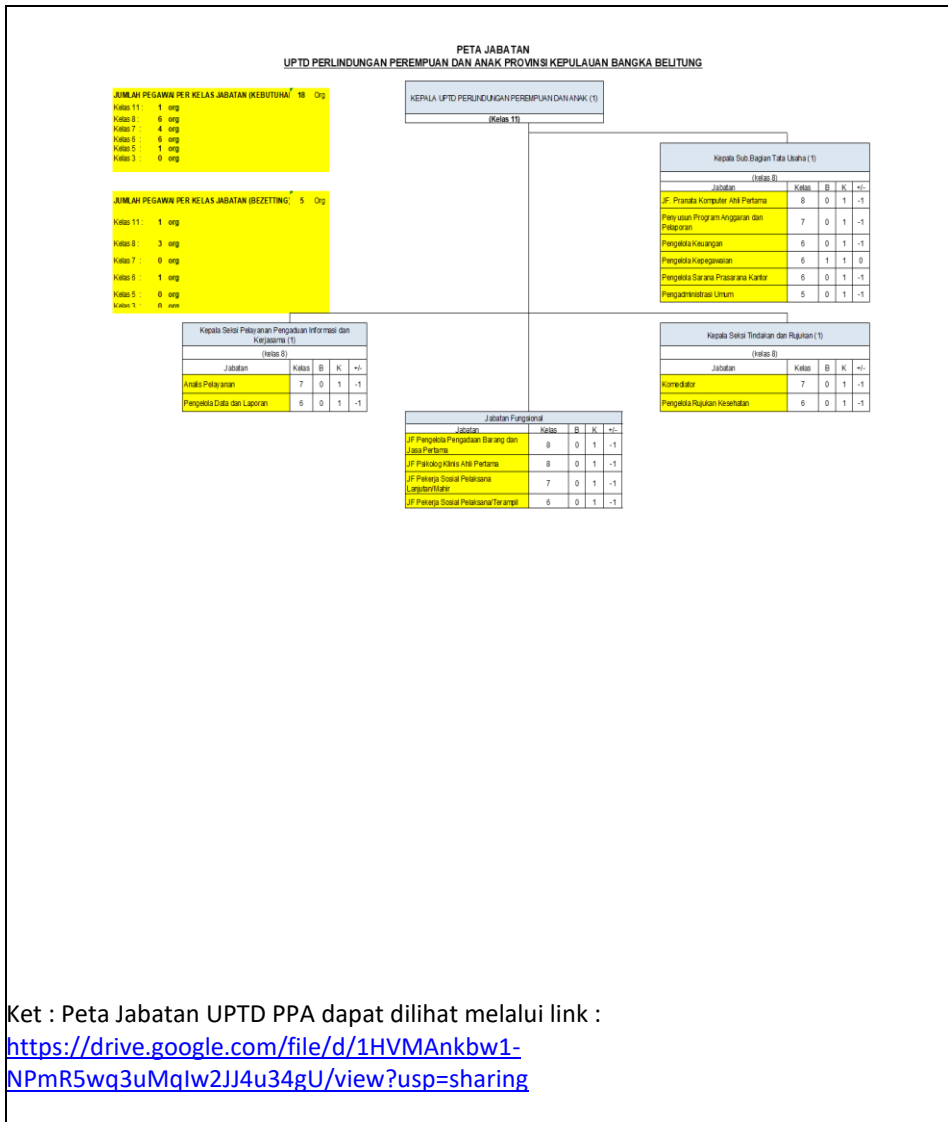
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ...(PD)..... Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana; dan
 5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 



1.3 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat

bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DP3ACSKB), Meningkatkan Pembangunan Responsif Gender, Meningkatkan Kesejahteraan Anak, Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja;
2. Masih lebarnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan;
3. Masih belum terpenuhinya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak;
4. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum, tentang hak anak dan tindak kekerasan terhadap anak;
5. maraknya kasus kekerasan terhadap anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masih ada;
6. kurangnya komitmen baik dari instansi pemerintah maupun swasta terhadap Kab/Kota Layak Anak;
7. Belum aktifnya semua Forum Anak baik ditingkat provinsi maupun kab/kota;
8. Kurangnya data pendukung, akibat dari belum seluruh Perangkat daerah memiliki data terpilah;
9. Belum Optimalnya peran keluarga mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3			SMA/SMP
A	JABATAN STRUKUTRAL	109	0	63	25	21	52	1	7	27	6	11	28	24
1	Kepala Dinas	1		1			1	1					1	0
2	Sekretaris	1		1			1		1				1	0
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	1		1			1			1			1	0
4	Kepala Bidang Perlindungan Anak	1		1			0						0	0
5	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1		1			1		1				1	0
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1		1			1		1				0	1

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
7	Kepala UPTD PPA	1		1			1			1			0	1
8	Kasubbag Umum	1		1			1			1			0	1
9	Kasubbag TU UPTD PPA	1		1			1		1				1	0
10	Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Informasi dan Kerjasama	1		1			1			1			0	1
11	Kepala Seksi Tindakan dan Rujukan	1		1			1			1			1	0
B	JABATAN FUNGSIONAL													
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2		2			2		2				2	0
2	Perencana Ahli Muda	5		5			4			4			2	2
3	Analisis Keuangan Pusat/Daerah	1		1			1			1			0	1
4	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	6		6			4		1	3			1	3

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
5	Pranata Komputer Ahli Muda	1		1			0						0	0
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama	2		2			0						0	0
7	Pranata Humas Ahli Pertama	1		1			0						0	0
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	2		2			1			1			1	0
9	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1		1			0						0	0
10	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	1		1			0						0	0
11	Psikolog Klinis Ahli Pertama	1		1			0						0	0
12	Pranata Humas Penyelia	1			1		0						0	0

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
13	Pranata Komputer Pelaksana Penyelea	1			1		0						0	0
14	Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Mahir	1			1		1				1		1	0
15	Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Mahir	1			1		0						0	0
16	Pekerja Sosial Pelaksana Lanjutan/Mahir	1			1		0						0	0
17	Pranata Komputer Terampil Pelaksana	1			1		1				1		0	1
18	Arsiparis Terampil	1			1		0						0	0
19	Pekerja Sosial Pelaksana/Terampil	1			1		0						0	0
C	JABATAN PELAKSANA													
1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1			1		0						0	0

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3			SMA/SMP
2	Pengelola Program dan Kegiatan	1			1		0					0	0	
3	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1				1	1					1	0	1
4	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1		1			1			1		1	0	
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2			2		0					0	0	
6	Pengadministrasi Umum	4				4	1				1	0	1	
7	Bendahara	1			1		1				1	0	1	
8	Verifikator Keuangan	1			1		0					0	0	
9	Pengadministrasi Keuangan	1				1	1				1	0	1	
10	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	8		8			2			2		1	1	

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
11	Analisis Perlindungan Perempuan	2		2			1			1			1	0
12	Pengawas Perempuan dan Anak	3		3			0						0	0
13	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	1			1		1				1		1	0
14	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1			1		0						0	0
15	Pengelola Data	1			1		0						0	0
16	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	2			2		1				1		0	1
17	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6		6			2			2			2	0
18	Pengadministrasian Kependudukan	2				2	1					1	1	0

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI					LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S3	S2	S1	D3	SMA/SMP		
19	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	2		2			2			2			1	1
20	Analisis Keluarga Berencana	1		1			1			1			0	1
21	Analisis Kesejahteraan Keluarga	2		2			0						0	0
22	Pengelola Advokasi Konselling dan Pembinaan Keluarga	2			2		0						0	0
23	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	1			1		0						0	0
24	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1		1			1			1			1	0
25	Pengelola Keuangan	1			1		0						0	0
26	Pengelola Kepegawaian	1			1		0						0	0

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang (1,92%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 7 orang (13,46%), S1 sebanyak 27 orang (51,92%), D3 sebanyak 6 orang (11,54%), dan SLTA sebanyak 11 orang (21,15%). Komposisi pegawai perempuan/laki-laki*) sedikit lebih banyak/sedikit*) dibanding pegawai perempuan/laki-laki*); bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak/sedikit*) dijabat perempuan/laki-laki*). Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset* (Rp)
1	TANAH		
	TANAH		
2	PERALATAN DAN MESIN		
	ALAT BESAR	1	5.500.000,00
	ALAT ANGKUTAN	10	1.139.582.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
	ALAT PERTANIAN		
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	322	633.170.500,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	50	41.195.000,00
	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
	ALAT LABORATORIUM		
	ALAT PERSENJATAAN		
	KOMPUTER	39	728.132.000,00
	ALAT EKSPLORASI		
	ALAT PENGEBORAN		

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset* (Rp)
	ALAT PRODUKSI, PANGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
	ALAT BANTU EKSPLORASI		
	ALAT KESELAMATAN KERJA		
	ALAT PERAGA		
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
	RAMBU-RAMBU		
	PERALATAN OLAHRAGA		
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	BANGUNAN GEDUNG	12	4.029.710.252,00
	MONUMEN		
	BANGUNAN MENARA	1	25.000.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
	JALAN DAN JEMBATAN		
	BANGUNAN AIR	1	97.476.200,00
	INSTALASI		
	JARINGAN		
5	ASET TETAP LAINNYA		
	BAHAN PERPUSTAKAAN		
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRA		
	HEWAN		
	BIOTA PERAIRAN		
	TANAMAN		
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
7	ASET LAINNYA	78	160.732.000,00

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset* (Rp)
	ASET LAIN-LAIN		
	TOTAL		6.860.497.952,00

Kendaraan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 3 unit kendaraan operasional, 6 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 38 : 41 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 0,93% dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000an awal spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga kurang mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2023	Rp13.465.569.730	Rp766.872.900	-	-	Rp14.232.442.630
2025	Rp12.580.528.956	Rp704.083.900	-	-	Rp13.284.612.856

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp.947.829.774 dengan Total anggaran belanja sebesar Rp.27.517.055.486. Hal ini tidak ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD*
- 2. Strategi dan Arah Kebijakan*
- 3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025*
- 4. Indikator Kinerja Utama (IKU)*
- 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025*
- 6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD*

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023 – 2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatnya Pembangunan Manusia, dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah :

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DP3ACSKB);
2. Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Anak;
4. Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2025	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Persen	53.4	53.4	54	54.33	54.67	54.67	

	kehidupan ekonomi dan politik									
2	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	66.07	66.07	66.87	67.67	68.47	68.47	
3	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	73.24	73.24	73.94	74.64	75.34	75.34	
4	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	tase Cakupan Administrasi Kependudukan	Persen	76	76.37	79.11	81.85	84.58	84.58	
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.4	2.4	2.37	2.32	2.3	2.3	
6	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai	74	74	74.5	75	75.5	75.5	

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran berbasis gender
		Meningkatkan Peran aktif perempuan dalam keluarga	Peningkatan peran aktif perempuan melalui Industri Rumahan dengan memberikan pelatihan, TOT, Pembinaan dalam Sekolah Perempuan dan Pameran hasil karya
		Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Peningkatan tindakan preventif perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Meningkatkan SDM Perlindungan Khusus Anak	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perlindungan khusus anak dengan menitikberatkan pada pelayanan prima
		Meningkatkan SDM dalam pemenuhan hak anak	Peningkatan jumlah dan kinerja SDM Pemenuhan Hak Anak dengan fokus pada pengembangan kapasitas SDM dan Pelayanan Optimum
3	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Meningkatkan OPD yang memiliki data Terpilah	Peningkatan jumlah OPD yang memiliki data pilah sehingga dapat ajuan dalam perencanaan
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Memperkuat sinkronisasi kebijakan pengendalian Penduduk	Penguatan sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk
		Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Peningkatan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang holistik dan integratif dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga	Penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di kampung KB
5	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Meningkatkan fasilitasi pendaftaran penduduk dan Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur dukcapil kab/kota
		Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Peningkatan fasilitasi pendaftaran penduduk dan Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur dukcapil kab/kota
		Meningkatkan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi	Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dengan PD provinsi dan sektor lainnya

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kaulitas penyusunan data agregat dan profil kependudukan skala provinsi
6	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Meningkatkan Pelayan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayan Internal Perangkat Daerah

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
1. MENINGKATNYA TATA KELOLA INTERNAL PERANGKAT DAERAH (DP3ACSKB)	1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.313.705.406	9.148.203.768,14	(165.501.637,86)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.759.700,00	52.828.829,00	(42.930.871,00)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.004.833.926,00	7.310.999.836,99	306.165.910,99
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000,00	36.401.154,15	(18.598.845,85)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.937.300,00	398.052.900,00	(884.400,00)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	727.083.900,00	536.458.000,00	(190.625.900,00)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	622.400.000,00	582.700.000,00	(39.700.000,00)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.359.500,00	212.349.500,00	(164.010.000,00)
2. MENINGKATNYA PERAN AKTIF PEREMPUAN DALAM KEHIDUPAN EKONOMI DAN POLITIK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	173.000.000,00	85.637.200,00	(87.362.800,00)
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	173.000.000,00	85.637.200,00	(87.362.800,00)
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	238.958.750,00	173.968.750,00	(64.990.000,00)
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	153.999.650,00	89.009.650,00	(64.990.000,00)
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	474.186.500,00	237.281.500,00	(236.905.000,00)
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	319.186.500,00	106.431.500,00	(212.755.000,00)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	155.000.000,00	130.850.000,00	(24.150.000,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Anak Kewenangan Provinsi			
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	173.000.000,00	85.637.200,00	(87.362.800,00)
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	173.000.000,00	85.637.200,00	(87.362.800,00)
3. MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	761.500.000,00	442.233.300,00	(319.266.700,00)
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	162.500.000,00	102.500.000,00	(60.000.000,00)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	599.000.000,00	339.733.300,00	(259.266.700,00)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	181.220.900,00	247.294.250,00	66.073.350,00
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	62.263.350,00	46.263.350,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	14.700.000,00	34.510.000,00	19.810.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	761.500.000,00	442.233.300,00	(319.266.700,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
4. MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	64.000.000,00	40.559.500,00	(23.440.500,00)
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	64.000.000,00	40.559.500,00	(23.440.500,00)
5. MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN TOTAL	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	62.000.000,00	27.927.000,00	(34.073.000,00)
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	31.000.000,00	27.223.000,00	(3.777.000,00)
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	31.000.000,00	704.000,00	(30.296.000,00)
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	347.340.800,00	234.416.600,00	(112.924.200,00)
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	275.340.800,00	222.416.600,00	(52.924.200,00)
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	72.000.000,00	12.000.000,00	(60.000.000,00)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	405.200.500,00	120.742.800,00	(284.457.700,00)
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga	223.961.100,00	103.006.500,00	(120.954.600,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	181.239.400,00	17.736.300,00	(163.503.100,00)
6. MENINGKATNYA CAKUPAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	406.000.000,00	128.555.300,00	(277.444.700,00)
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	92.000.000,00	26.296.800,00	(65.703.200,00)
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	223.000.000,00	59.612.100,00	(163.387.900,00)
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	91.000.000,00	42.646.400,00	(48.353.600,00)
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	443.000.000,00	128.196.700,00	(314.803.300,00)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	139.000.000,00	74.000.100,00	(64.999.900,00)
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	201.000.000,00	16.000.000,00	(185.000.000,00)
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	03.000.000,00	38.196.600,00	(64.803.400,00)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	347.000.000,00	179.630.000,00	(167.370.000,00)
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.000.000,00	25.026.200,00	(24.973.800,00)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	186.000.000,00	84.784.300,00	(101.215.700,00)

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (RP)
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	111.000.000,00	69.819.500,00	(41.180.500,00)
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	67.500.000,00	32.331.000,00	(35.169.000,00)
	Penyediaan Profil Kependudukan	67.500.000,00	32.331.000,00	(35.169.000,00)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Indikator Sasaran		13.284.612.856,00	11.226.977.668,14	(2.057.635.187,86)

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 050/047/DP3ACSKB/2023 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas P3ACSKB
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam	Indeks Pemberdayaan	Persen	54,33	Triwulan 1	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
	kehidupan ekonomi dan politik	gender (IDG)				
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	54,33
2.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	67,67	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	67,67
3.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	74,64	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	74,64
4.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	Persen	81,85	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	68,85
					Triwulan 4	81,85
5.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,32	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	2,32
6.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai	75	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	75

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dina P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp9.280.374.326	APBD TA. 2025
2.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp173.000.000	APBD TA. 2025
		Program Perlindungan Perempuan	Rp238.958.750	APBD TA. 2025
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp474.186.500	APBD TA. 2025
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp181.220.900	APBD TA. 2025
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp761.500.000	APBD TA. 2025
4.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp64.000.000	APBD TA. 2025
5.	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Rp62.000.000	APBD TA. 2025
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp347.340.800	APBD TA. 2025
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp405.200.500	APBD TA. 2025
6.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Rp406.000.000	APBD TA. 2025
		Program Pencatatan Sipil	Rp443.000.000	APBD TA. 2025
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp347.000.000	APBD TA. 2025

		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp67.500.000	APBD TA. 2025
--	--	--	--------------	---------------

2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B274/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 yaitu “ menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas P3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Persen	58,23	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perubahan	Triwulan	Target
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	58,23
2.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Persen	62,55	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	62,55
3.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Persen	79,40	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	79,40
4.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	Persen	80,08	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	68,85
					Triwulan 4	80,08
5.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,17	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	2,17
6.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai	-	Triwulan 1	-
					Triwulan 2	-
					Triwulan 3	-
					Triwulan 4	-

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dina P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp9.148.203.768,14	APBD-P TA. 2025
2.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp85.637.200,00	APBD-P TA. 2025
		Program Perlindungan Perempuan	Rp173.968.750,00	APBD-P TA. 2025
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp237.281.500,00	APBD-P TA. 2025
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp247.294.250,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp442.233.300,00	APBD-P TA. 2025
4.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp40.559.500,00	APBD-P TA. 2025
5.	Total Fertility Rate (TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Rp27.927.000,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp234.416.600,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp120.742.800,00	APBD-P TA. 2025
6.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Rp128.555.300,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pencatatan Sipil	Rp128.196.700,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp179.630.000,00	APBD-P TA. 2025
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp32.331.000,00	APBD-P TA. 2025

Keterangan Tambahan:

1. Anggaran berkurang sebesar 15,49% sehubungan adanya antisipasi defisit anggaran maka perlu *efisiensi* anggaran agar likuiditas keuangan pemerintah provinsi dapat terjaga dan stabil.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://dp3acskb.babelprov.go.id/>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, permohonan informasi dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti prod.lapor.go.id dan Pelayanan Informasi Publik.

**Gambar II.2. Website Dinas P3ACSKB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

KEMPLANG PANGGANG BU SUS

NAMA PEMILIK : SUSMAWATI
ALAMAT : Desa Sungai Selan Atas
NOMOR HP/WA : 085766925933
DESKRIPSI USAHA : - Dimulai tahun 2022
 - Industri Rumahtan Pemula
 - Belum pernah mendapatkan bantuan

JUMLAH PEGAWAI : 4 - 5 Orang
BESARAN DANA : 1x Produksi Rp. 400.000,-
PENGEMBANGAN USAHA : s.d. Rp. 1.000.000,-

BENTUK PROMOSI KEMPLANG PANGGANG BU SUS
 - Toko Seblar dan Belum Digital
 - Membutuhkan Etalase
 - Bantuan Dana dari Dinas terkait
 - Butuh Pemasaran dan Branding



Berita

19/03/2025 | DP3ACSKB
Bulan Ramadan Kesempatan untuk Melatih Diri
 Pangkalpinang - Dr. Asyaf Suryadin, M.Pd Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyayenkan agar bulan Ramadan dapat menjadi momen untuk melatih diri. Lalu...



11/03/2025 | DP3ACSKB
Kultur Ramadan, Asyraf Berpesan Agar Bisa Menghargai Waktu

11/03/2025 | DP3ACSKB
Stop Bullying, Asyraf Forum Anak Menjadi Salah Satu Solusinya

09/03/2025 | DP3ACSKB
Raport Pembudayaan Perempuan, Asyraf Stop Beri Kelutuhan Data Penyusunan...

08/03/2025 | DP3ACSKB
Ingin Hidup Tenang, Indrawati Sampaikan Sarannya

03/03/2025 | DP3ACSKB
Kultur Bta Ga Zuhur, Asyraf Pansa Menjay Talwa

25/02/2025 | DP3ACSKB
Puluhan Guru Menyumbang DP3ACSKB, Ini Tujuannya



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan untuk DP3ACSKB

Melalui <https://lapor.go.id>



Artikel

- 16/09/2022 | DP3ACSKB
IT AUDIT
- 23/08/2022 | DP3ACSKB
Kompetensi Ms. Excel untuk ASN
- 11/02/2022 | DP3ACSKB
PEMELHARAAN PC / LAPTOP YANG BAIK DAN BENAR
- 17/01/2022 | DP3ACSKB
Onedrive vs Google Drive
- 16/01/2021 | DP3ACSKB
Work From Home bersama Cloud Computing saat Pandemi Corona
- 24/08/2020 | DP3ACSKB
Aplikasi Zoom Cloud Meeting, Memudahkan WFH
- 02/06/2020 | DP3ACSKB
Media Sosial Sebagai Media Alternatif Kebutuhan Informasi di Masa Pandemi Covid 19

Video Terbaru

05/05/2018 | Lery, DP3ACSKB
 "The Cika" Perform Three Ends



Berita Provinsi

Babelprov | Humas | BAPROV

- PORTAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**
<http://www.indonesia.go.id>
- REMBEYAN PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN ANAK Republik Indonesia**
- PORTAL PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**
<http://www.babelprov.go.id>
- LPSE BANGKA BELITUNG**
LAYANAN PENYEDIAAN SECARA ELEKTRONIK
- INFORMASI PUBLIK Hak Anda untuk Tahu!**
<http://ppid.babelprov.go.id>

Link Kabupaten Kota



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	<p><u>Indikator:</u> Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u> Berdasarkan PermenPAN RB No. 26 tahun 2020. Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil</p>	Nilai	74	-	-	Sudah Tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja	-	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	<p><u>Indikator:</u> Indeks Pemberdayaan gender (IDG)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u></p> $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$ <p>I(par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(inc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.</p>	persen	52,59	58,22	58,23	58,22*	99,98	Sangat Baik	54,67

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	<p><u>Indikator:</u> Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u></p> $IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot klaster ke-j Indeks Kj adalah nilai indeks klaster ke-j.</p>	persen	66,07	60,89	62,55	60,89*	97,35	Sangat Baik	68,47

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Meningkatnya perlindungan khusus anak	<p><u>Indikator:</u> Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u></p> $IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak Wi adalah Bobot indikator ke-I SXi adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p>	persen	73,24	79,05	79,40	79,05*	99,56	Sangat Baik	75,34

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total	<p><u>Indikator:</u> Total Fertility Rate (TFR)</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u></p> $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu. i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.</p>	persen	2,4	2,18	2,17	2,18	99,54	Sangat Baik	2,3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2023	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	<p><u>Indikator:</u> Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan</p> <p><u>Formula Perhitungan:</u> Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi dibagi 4 dan dikalikan 100%.</p>	persen	76	94,43	80,08	95,38	119,11	Sangat Baik	84,58



Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1. Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB) diukur dengan indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Berdasarkan PermenPAN RB No. 03 tahun 2023. Nilai RB di Unit Kerja tidak ada lagi.

Kinerja sasaran Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB) mulai tahun 2023 tidak diukur lagi, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 3/2023 Tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 dan Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi, sehingga capaian indikator kinerja ini tidak diukur.

Walaupun demikian Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB) pada tahun 2023 tetap dilaksanakan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

(tabel ini dapat di buat landscape)

No	Indikator Sasaran	2023			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	74	-	-	-	-	-	75,5	-

Analisis Ketercapaian Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Internal Prangkat Daerah (DP3ACSKB) adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sasaran Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB) sudah tidak dapat diukur, karena sudah tidak ada penilaian RB pada unit kerja, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 3/2023 Tentang Perubahan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2025 dan Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi.
- b. Realisasi tahun lalu sebesar 75,11, terhadap target tahun lalu sebesar 74 atau sebesar 101,50%.
- c. Sehingga target tahun 2023 sudah berhasil tercapai.

Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah didukung dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan sasaran program Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan Indikator :

1.1 Nilai SAKIP perangkat daerah dengan formula perhitungan indikator ini adalah dari Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana yang dinilai oleh Inspektorat Provinsi Kep. Bangka Belitung dan untuk tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian target kinerja adalah: Melakukan rapat evaluasi kinerja lintas program dan Menindaklanjuti hasil penilaian SAKIP tahun 2023, sesuai dengan rekomendasi dari auditor yang dibuktikan dengan dokumen/data-data pendukungnya.

Adapun rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 adalah:

1. Rekomendasi pertama : Dokumen IKU pada Perangkat Daerah tidak bisa di nilai karena belum di Upload <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>
2. Rekomendasi kedua : Pengukuran Kinerja dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
3. Rekomendasi ketiga : Setiap unit/Satuan Kerja dan pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
4. Rekomendasi keempat : Setiap unit/Satuan Kerja dan pegawai supaya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
5. Rekomendasi kelima : Dokumen Laporan Kinerja supaya di Upload di dalam <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>
6. Rekomendasi keenam : Informasi dalam Laporan Kinerja agar di Upload di dalam <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>
7. Rekomendasi ketujuh : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya di Upload di dalam <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>
8. Rekomendasi kedelapan : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar di Upload di dalam <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>
9. Rekomendasi kesembilan : Implementasi SAKIP agar di Upload di dalam <https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x>

Untuk bukti pendukung dari masing-masing rekomendasi dapat dilihat di lampiran laporan kinerja ini.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.52.828.829 terdiri dari subkegiatan antara lain:
 - 1) Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;

- 3) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD;
- 4) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Kemudian Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sasaran program kedua yaitu Meningkatnya pelayanan internal perangkat daerah, dengan indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DP3ACSKB). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(75/75) \times 100\% = 100\%$ dari target 75 atau sebesar 100 %. Capaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang. Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen.

Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor dan peralatan kantor lainnya, peningkatan pelayanan administrasi keuangan, peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian serta peningkatan pelayanan administrasi umum. Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.310.999.836,99 terdiri dari :
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp36.401.154,15 dengan subkegiatan yaitu:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp398.052.900 terdiri dari beberapa subkegiatan antara lain:
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 4) Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material;

- 5) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 6) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp536.458.000 dengan rincian subkegiatan antara lain:
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 2) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 3) Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp582.700.000,00 terdiri dari:
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp212.349.500 terdiri dari:
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Kemudian Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan dengan sasaran program ketiga yaitu Meningkatnya pelayanan internal UPTD PPA, dengan Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA). Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(75/75) \times 100\% = 100\%$ dari target 75 atau sebesar 100 %. Capaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kemudian dihitung rerata validitas setiap parameter tersebut dalam persen. Capaian indikator kinerja ini didukung melalui upaya penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp18.413.548,00 dengan subkegiatan antara lain:
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan;
 - 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Sasaran ini didukung oleh:

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah serta lintas sektor sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Dukungan anggaran baik melalui APBD maupun APBN.
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran ini mengalami kendala sebagai berikut :

- a. Proses pelaksanaan evaluasi dan pengendalian internal atas pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan masih belum optimal karena belum tersistematis terutama pelaksanaan awal tahun menjadi padat karena bersamaan dengan agenda lain dan berbenturan dengan jadwal kegiatan lainnya.
- b. Keterbatasan data dilapangan serta lambannya rilis capaian dari Pemerintah Pusat menjadi masalah dalam mengukur capaian.
- c. Koordinasi lintas bidang yang belum maksimal dalam rangka mendukung capaian organisasi.

Tabel III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target (Nasional)	Target (PD)	Realisasi (Nasional)	Realisasi (PD)	Capaian (Nasional)	Capaian (PD)
1.	<p>Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)</p> <p>Berdasarkan PermenPAN RB No. 26 tahun 2020.</p> <p>Mulai Tahun 2023 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja</p>	*	74	*	-	*	-

- a. Tidak bisa diperbandingkan karena mulai tahun 2023 berdasarkan PermenPAN RB no. 26 Tahun 2020 sudah tidak ada penilaian RB unit kerja.

Gambar III.1
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Pejabat Eselon III melakukan Penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025</p>

2.		<p>Tenaga honorer di lingkungan Dinas P3ACSKB melakukan penandatanganan kontrak kerja</p>
----	---	---

3.2. Sasaran : Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik

Kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan IDG

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	$IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$ <p>I(par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(inc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.</p>

Kinerja sasaran Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$ pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 58,22 (capaian tahun 2023) atau sebesar 99,98 dari target 58,23

persen. Sumber data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Target dan Realisasi IDG Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2023			2025			Target Akhir RPD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	53,4	58,22	109,03	58,23	58,22	99,98	54,67	106,49

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik adalah sebagai berikut:

- Capaian sebesar 58,22% (data capaian 2023), dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 99,98%.
- Tidak bisa Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 58,22% (kolom 4), terhadap target tahun lalu sebesar 53,4% karena capaian tahun 2025 belum di rilis (persentase capaian tahun ini dikurang persentase capaian tahun lalu)
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Indeks Pemberdayaan gender (IDG) tercapai 106,49%.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan sasaran kinerja program Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mempunyai Indikator kinerja Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah ARG pada belanja langsung APBD dibagi Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di provinsi dikali 100% (dari belanja modal dan

operasi, belanja operasi tidak termasuk gaji, subsidi, bunga, dan hibah), Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(251.979.905.096/1.705.061.762.930) \times 100\% = 20,48\%$ dari target 2,6% atau sebesar 787,69%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Program/kegiatan PUG pada Organisasi Perangkat yang sudah dievaluasi melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) di tingkat provinsi;
- b. Lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi telah dilatih PUG;
- c. Pengawasan pelaksanaan PPRG pada setiap OPD.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Belum semua OPD memiliki data pilah gender, sebagai landasan perencanaan dan penganggaran responsif gender
- b. Masih ada pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran gender adalah tanggungjawab sektoral dan belum menjadi perspektif bagi OPD yang lain.
- c. SDM aparatur kurang memahami konsep dan permasalahan gender (tidak sensitif gender)

Upaya kedepan agar indikator kinerja program tetap tercapai:

- a. Melaksanakan pelatihan SDM aparatur agar bisa memahami konsep dan permasalahan gender
- b. Menyediakan data pilah gender di setiap OPD sebagai landasan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- c. Meningkatkan komitmen pemangku kebijakan terkait PPRG sebagai tugas utama setiap OPD.

2. Program Perlindungan Perempuan dengan sasaran kinerja program antara lain:

- a. Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan mempunyai Indikator Persentase kebijakan perlindungan perempuan formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kebijakan daerah perlindungan perempuan aktual dibagi dua kebijakan daerah terkait

(existing) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 jika dibandingkan pada Tahun 2023 sama.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d. Pergub Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/433/DP3ACSKB/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- f. SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/99/DP3ACSKB/2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- g. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Peningkatan Kualitas Keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Minimnya anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan kewenangan provinsi;
- b. Tingkat Kepedulian PD dan masyarakat terkait Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi masih rendah;
- c. Terbatasnya Jumlah SDM menangani Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi masih rendah.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi;
 - b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi.
-
- b. Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Perempuan mempunyai indikator Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah laporan korban kekerasan perempuan dan TPPO yang ditangani dibagi jumlah korban kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang terlayani dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama jika dibandingkan pada Tahun 2023.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Pergub Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Hambatan yang dialami berupa proses hukum yang berbelarut-larut, pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban;
- b. Terbatasnya jumlah petugas dan kurangnya konselor hukum dan tenaga psikolog;
- c. Adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka;
- d. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai urusan pribadi. Bahkan seringkali perempuan

korban KDRT juga menganggap perlakuan KDRT yang diterimanya merupakan hal yang wajar.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Menyediakan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Melakukan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan sasaran kinerja program Meningkatnya Peran aktif perempuan dalam keluarga mempunyai Indikator Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan formula perhitungan indikator ini adalah Angkatan kerja Perempuan dibagi Populasi usia kerja perempuan dikali 100%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(45/44,98) \times 100\% = 100,04\%$ dari target 44,98% atau sebesar 100,04%.




Tabel 3. 3. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indeks Pemberdayaan gender (IDG).</p> $IDG = \frac{I(\text{par}) + I(\text{DM}) + I(\text{inc-des})}{3}$ <p>I(par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(inc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.</p>	58,24%	71,07%*	122,03%

Tabel 3. 4. Perbandingan dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket
1.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG).	71,07%	77,62%	Dibawah realisasi nasional

Tabel 3. 5. DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Kegiatan Pelembagaan Bagi Perencana dan Penggerak Program Pengarusutamaan Gender (PUG)</p>
2.		<p>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan</p>
3.		<p>Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak</p>

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Memiliki Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang tergabung dalam Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. Memiliki Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang tergabung dalam Forum PUSPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Perempuan mengalami banyak kesulitan dalam memulai, mempertahankan dan mengembangkan usaha dibandingkan laki-laki;
- b. Kurangnya kesempatan perempuan untuk mengembangkan keterampilan, sulitnya akses finansial, kurangnya mentor dan jejaring usaha;
- c. serta kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program tetap tercapai:

- a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi;
- c. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

3.3. Sasaran : Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak

Kinerja sasaran Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak diukur dengan indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan IPHA

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak W_j adalah Bobot klaster ke-j Indeks K_j adalah nilai indeks klaster ke-j.</p>

Kinerja sasaran Meningkatkan pemenuhan hak terhadap anak diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$, pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 60,89% (capaian tahun 2023) atau sebesar 97,35% dari target 62,55% Sumber data Siga KemenPPPA tahun 2023. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Target dan Realisasi IPHA Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	2025			Target Akhir RPD (2026) (%)	Persentase Capaian kinerja TH 2023 terhadap target 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66,07	60,89	62,55	60,89*	97,35	68,47%	88,93

*Realisasi tahun 2023

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah sebagai berikut:

- Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 60,89% (capaian tahun 2023), dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 97,35% belum melampaui target.
- Belum bisa dibandingkan karena realisasi tahun 2025 belum di rilis.
- Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tercapai 88,93%. Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Khusus Anak dengan sasaran kinerja program antara lain:
 - a. Meningkatnya SDM Perlindungan Khusus Anak mempunyai Indikator Persentase Peningkatan SDM Perlindungan Anak, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah aktifis PATBM, aktifis LM perlindungan Anak dan personil UPTD PPA dibagi Jumlah Seluruh anak dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(33/33) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 33%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 33%.
 - b. Kekerasan terhadap Anak yang ditangani dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terlayani dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100% (capaian tahun lalu).

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Dukungan anggaran DAK non Fisik Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian PPA;
- b. Meningkatnya kualitas SDM perlindungan anak yang melayani kasus kekerasan anak kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota;
- c. Dukungan dari stakeholder atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- d. Peran aktif masyarakat dalam mendukung pelayanan pemerintah;
- e. Penguatan koordinasi lintas sektor;
- f. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak;
- g. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Minimnya anggaran yang bersumber dari APBD;
- b. Kurangnya fasilitas fisik seperti gedung, ruang pertemuan, peralatan dan tempat bermain anak;
- c. Kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta dalam penanganan urusan anak masih belum optimal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Anggaran dalam upaya perlindungan khusus anak mencukupi;
- b. Meningkatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif anak;
- c. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak;
- d. Meningkatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya bagi anak.

2. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan sasaran kinerja Meningkatnya SDM dalam pemenuhan hak anak mempunyai Indikator Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Anak yang diikutsertakan dalam kegiatan Forum anak dan HAN dibagi jumlah keseluruhan anak dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(20/19,90) \times 100\% = 100,50\%$ dari target sebesar 19,90%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

- a. Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;
- b. Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

- a. Anggaran yang bersumber dari APBD yang belum optimal;
- b. Minimnya jumlah SDM dalam pemenuhan hak anak tingkat provinsi;
- c. Dukungan lintas sektor yang belum optimal;
- d. Kualitas SDM dalam pemenuhan hak anak tingkat provinsi yang belum optimal.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

- a. Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan pelembagaan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi;
- b. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak kepada Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi;
- c. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Meningkatkan advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi;

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi IPHA Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</p> $IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ <p>IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot kluster ke-j Indeks Kj adalah nilai indeks kluster ke-j.</p> <p>Realisasi = $(60,89/66,07) \times 100\%$ = 92,16%</p>	62,55%	60,89%*	97,35%

*Realisasi tahun 2023

Tabel 3. 9 Perbandingan IPHA dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,89%*	68,47%*	dibawah realisasi nasional

*Realisasi tahun 2023

Tabel 3. 10 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		<p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota.</p>
2.		<p>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/kota</p>
3.		<p>Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak</p>

3.4. Sasaran : Meningkatnya perlindungan khusus anak

Kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan khusus anak diukur dengan indikator Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan IPKA

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times S_{X_i})$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak W_i adalah Bobot indikator ke-i S_{X_i} adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p>

Kinerja sasaran Meningkatkan perlindungan khusus anak diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times S_{X_i})$, pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 79,05% (capaian tahun 2023) atau sebesar 99,56% dari target 79,40% Sumber data Siga KemenPPPA tahun 2023. Kinerja indikator sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Target dan Realisasi Kinerja IPKA Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	2025			Target Akhir RPD (2026) (%)	Persentase Capaian kinerja TH 2025 terhadap target 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	73,24	79,05	79,40	79,05*	99,56	75,34	104,92

*Realisasi tahun 2023

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 79,05% (capaian tahun 2023) , dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 99,56% belum melampaui target.
- b. Tidak bisa dibandingkan karena realisasi tahun 2025 belum di rilis.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tercapai 104,92%. Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan sasaran kinerja program antara lain:
 - a. Meningkatnya OPD yang memiliki data Terpilah mempunyai Indikator Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah OPD yang memiliki data Pilah di bagi jumlah keseluruhan OPD (27) di kali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 92,59%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2025.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan instansi/organisasi sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam pengelolaan data gender dan anak.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak, untuk mendukung pengelolaan data.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan data gender dan anak, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data gender dan anak.
3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendukung pengelolaan data.
4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program berjalan efektif.

2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung pengelolaan data.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung program dan kegiatan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf
3. Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data dan sistem informasi
4. Birokrasi yang rumit dan tidak efektif

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke data dan informasi
2. Kurangnya dukungan masyarakat dan stakeholders
3. Perubahan kebijakan dan peraturan
4. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap
3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif
4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Memastikan pimpinan instansi/organisasi memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai indikator kinerja program.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola data dan sistem informasi.
3. Memastikan teknologi yang digunakan sudah optimal dan sesuai dengan kebutuhan program.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program dan mengidentifikasi hambatan.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya.
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam program untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk

- mendukung program.
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan efektivitas program.

Upaya Proses

- Mengembangkan rencana aksi yang efektif untuk mencapai indikator kinerja program.
- Mengoptimalkan penggunaan data akurat dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau kemajuan program dan mengidentifikasi hambatan.
- Mengembangkan mekanisme evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program dan mengidentifikasi hambatan..

Tabel 3. 13 Target dan Realisasi Kinerja IPKA Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</p> $IPKA = \sum_{I=1}^5 (W_i \times S_{Xi})$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak Wi adalah Bobot indikator ke-i SXi adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p> <p>Realisasi = $(79,40 / 79,05) \times 100\%$ = 99,56%</p>	79,40%	79,05%*	99,56%

*Realisasi tahun 2023

Tabel 3. 14 Perbandingan IPKA dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket
-----	-----------	-----------	--------------------	-----

1.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,05%*	75,72%*	Diatas realisasi nasional
----	--	---------	---------	---------------------------

*Realisasi tahun 2023

Tabel 3. 15 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap ada komitmen dari pihak kabupaten/kota dalam menyiapkan Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA).

3.5. Sasaran : Menurunnya Angka Kelahiran Total

Kinerja sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total diukur dengan Total Fertility Rate (TFR).

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 16 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan TFR

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4

1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR).	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu. i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.</p>
----	----------------------------------	-----------------------------	---

Kinerja sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$, pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 2,18% atau sebesar 99,54% dari target 2,17% Sumber data Direktorat Pelaporan dan Statistik BKKBN 2025.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Target dan Realisasi Kinerja TFR Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	2025			Target Akhir RPD (2026) (%)	Persentase Capaian kinerja TH 2025 terhadap target 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Total Fertility Rate (TFR).	2,4	2,18	2,17	2,18	99,54	2,30	105,22

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 2,18% , dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 99,54% belum melampaui target.

- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 2,18%, dengan target sebesar 2,40% terdapat penurunan sebesar 0%. Penurunan sebesar 0% dari tahun sebelumnya dapat dianggap sebagai penurunan yang relatif kecil dan stabil. Dalam konteks pengendalian penduduk, penurunan TFR yang stabil dan terkendali dapat dianggap sebagai ideal karena menunjukkan bahwa upaya pengendalian penduduk sedang berjalan dengan baik dan tidak terlalu drastis.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR), tercapai 105,22%. Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan sasaran kinerja program antara lain:

- a. Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pengendalian Penduduk mempunyai Indikator Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah kabupaten kota yang mendapat pembinaan KKBPK dibagi jumlah kabupaten kota dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $(5/7) \times 100\% = 71,42\%$ dari target sebesar 71,42%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capain Tahun 2023 sebesar 57,14%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan pembinaan penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam pengelolaan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak, untuk mendukung pengelolaan data.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan pembinaan penyediaan dan pemanfaatan data.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung pengelolaan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, seperti Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN pusat dan perwakilan serta Badan Pusat Statistik, untuk mendukung pengelolaan data.

4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan pembinaan penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga berjalan efektif.
2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan pembinaan penyediaan dan pemanfaatan data.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat program.
2. Kurangnya Komitmen: Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dapat menghambat program.
3. Keterbatasan Kemampuan: Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data dan sistem informasi dapat menghambat program.
4. Birokrasi yang Rumit: Birokrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menghambat program.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan Akses: Keterbatasan akses ke data dan informasi dapat menghambat program.
2. Kurangnya Dukungan Masyarakat: Kurangnya dukungan masyarakat dan stakeholders dapat menghambat program.
3. Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan dan peraturan dapat menghambat program.
4. Keterbatasan Teknologi: Keterbatasan teknologi dan infrastruktur dapat menghambat program.

Faktor Proses

1. Kurangnya Perencanaan: Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dapat menghambat program.
2. Keterbatasan Pengumpulan Data: Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dapat menghambat program.
3. Kurangnya Analisis Data: Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dapat menghambat program.
4. Keterbatasan Penggunaan Data: Keterbatasan penggunaan data yang efektif dapat menghambat program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan kabupaten/kota dalam rangka Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengelolaan data.
3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN dan Badan Pusat Statistik.
2. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk mendukung pengelolaan data.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Upaya Proses

1. Mengembangkan rencana aksi yang efektif: Kembangkan rencana aksi yang efektif untuk mencapai indikator.
 2. Mengoptimalkan penggunaan data dan memastikan data yang digunakan sudah akurat dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan.
 3. Mengembangkan sistem pelaporan yang efektif untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan.
 4. Mengembangkan mekanisme evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan.
2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)** mempunyai Indikator persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan KB dan Kesehatan Reproduksi dibagi jumlah Kabupaten/Kota dikali 100 %. Capaian indikator kinerja adalah $(7/7) \times 100\% = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan pada Tahun 2023

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen Pimpinan: Komitmen dan dukungan dari pimpinan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berjalan efektif.

2. Sumber Daya Manusia: Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam pengelolaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Infrastruktur: Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti kantor, peralatan, dan teknologi informasi, untuk mendukung kegiatan program.
4. Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan Peraturan: Kebijakan dan peraturan yang mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, seperti Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Dukungan Masyarakat: Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, seperti kesadaran akan pentingnya keluarga berencana.
3. Kerjasama dengan Instansi Lain: Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
4. Teknologi Informasi: Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung kegiatan program.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang Baik: Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi berjalan efektif.
2. Pengumpulan Data yang Akurat: Pengumpulan data yang akurat dan lengkap untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis Data yang Tepat: Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan Data yang Efektif: Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
2. Kurangnya komitmen dan dukungan dari pimpinan dan staf.
3. Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Birokrasi yang rumit dan tidak efektif.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke informasi dan edukasi tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan yang tidak mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang tidak memadai.

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Faktor Sosial Budaya

1. Norma dan nilai sosial budaya yang tidak mendukung program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Keterbatasan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
4. Diskriminasi dan stigma terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Mengembangkan kemampuan staf dalam mengelola program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.
4. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi.

Upaya Proses

1. Mengembangkan perencanaan yang baik dan matang dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
3. Mengembangkan analisis data yang tepat dan efektif dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan penggunaan data yang efektif dalam program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Tabel 3. 18 Target dan Realisasi Kinerja TFR Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Total Fertility Rate (TFR)</p> $TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu. i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.</p> <p>Realisasi = $(2,17/2,18) \times 100\% = 99,54\%$</p>	2,17%	2,18%	99,54%

Tabel 3. 19 Perbandingan TFR dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket

1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,18%	2,14%	Dibawah realisasi nasional
----	----------------------------	-------	-------	----------------------------

Tabel 3. 20 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2.		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan PIK R di Kampung KB

3.		Kegiatan Pembinaan dan Promosi Kesehatan Reproduksi
4.		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja
5.		Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja

3.6. Sasaran : Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan

Kinerja sasaran Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan diukur dengan indikator kinerja Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Persentase Cakupan Adminduk

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan perjanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi yang akurat dibagi 4 dan dikalikan 100%

Kinerja sasaran Meningkatkan cakupan administrasi kependudukan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan perjanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi yang akurat dibagi 4 dan dikalikan 100%, pada Tahun 2025 capaian kinerja indikator sasaran ini adalah 95,38% atau sebesar 119,11% dari target 80,08%. Sumber data Dinas P3ACSKB Bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diolah.

Kinerja indikator sasaran pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Adminduk Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	2025			Target Akhir RPD (2026) (%)	Persentase Capaian kinerja TH 2025 terhadap target 2026 (%)
				Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	76,37	94,43	80,08	95,38	119,11	84,58	112,77

Analisis Ketercapaian indikator Sasaran Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 95,38% , dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 119,11% melampaui target.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 94,43%, dengan target sebesar 76,37% terdapat kenaikan sebesar 0,95%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RPD, indikator Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan, tercapai 112,77%. Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan sasaran kinerja yaitu Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan mempunyai Indikator Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA), formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga + Persentase Kepemilikan KTP-el + KIA di bagi 3 jenis dokumen kependudukan dan dikalikan 100%. Capaian indikator kinerja tahun 2025 adalah 91% dari target sebesar 89,8%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capain Tahun 2023 sebesar 89,03% terjadi kenaikan sebesar 1,97%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen Pimpinan dan dukungan dari pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting untuk memastikan program pendaftaran penduduk berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam pengelolaan data penduduk.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak, untuk mendukung pengelolaan data penduduk.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program pendaftaran penduduk.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung program pendaftaran penduduk, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pendaftaran penduduk, seperti kesadaran akan pentingnya pendaftaran penduduk.
3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data penduduk.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program pendaftaran penduduk berjalan efektif.
2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang penduduk untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program pendaftaran penduduk.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat program.
2. Kurangnya Komitmen: Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dapat menghambat program.
3. Keterbatasan Kemampuan: Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data penduduk dapat menghambat program.
4. Birokrasi yang Rumit: Birokrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menghambat program.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke informasi dan teknologi dapat menghambat program.
2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan dapat menghambat program.
4. Keterbatasan sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, dapat menghambat program.

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dapat menghambat program.
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dapat

- menghambat program.
3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dapat menghambat program.
 4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif dapat menghambat program.

Faktor Teknis

1. Keterbatasan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, dapat menghambat program.
2. Keterbatasan jaringan dan konektivitas dapat menghambat program.
3. Keterbatasan keamanan data dapat menghambat program.
4. Keterbatasan pemeliharaan sistem dapat menghambat program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf untuk mencapai target program.
2. Mengembangkan kemampuan staf dalam mengelola data penduduk dan menggunakan teknologi.
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, untuk mendukung program.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pendaftaran penduduk.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Upaya Proses

1. Mengembangkan perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai target program.
2. Meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang penduduk.
3. Mengembangkan analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program.

Upaya Teknis

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendukung pengelolaan data penduduk.
2. Meningkatkan keamanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan

- data.
3. Mengembangkan pemeliharaan sistem yang efektif untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.
 4. Meningkatkan ketersediaan teknologi, seperti komputer dan jaringan, untuk mendukung program.
2. Program Pencatatan Sipil mempunyai Indikator Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan), formula perhitungan indikator adalah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Akte Perkawinan di bagi 3 jenis dok kependudukan dan dikalikan 100%. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 89,5%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 karena ada perubahan perhitungan target program. Target tahun 2023 untuk perhitungan akta perkawinan dan kematian yang dilaporkan menjadi 100%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting untuk memastikan program pencatatan sipil berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam pengelolaan data pencatatan sipil.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti kantor, peralatan, dan teknologi informasi, untuk mendukung pengelolaan data pencatatan sipil.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program pencatatan sipil.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung program pencatatan sipil, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pencatatan sipil, seperti kesadaran akan pentingnya pencatatan sipil.
3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data pencatatan sipil.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program pencatatan sipil berjalan efektif.
2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang pencatatan sipil untuk

- mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
 4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program pencatatan sipil.

Faktor Sosial Budaya

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
2. Norma dan nilai sosial yang mendukung program pencatatan sipil, seperti kesadaran akan pentingnya kebenaran dan akurasi data.
3. Partisipasi masyarakat dalam program pencatatan sipil, seperti kesediaan untuk memberikan informasi dan data yang akurat.
4. Dukungan tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan tokoh agama, untuk mempromosikan program pencatatan sipil.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat program.
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dapat menghambat program.
3. Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data pencatatan sipil dapat menghambat program.
4. Birokrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menghambat program.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke informasi dan teknologi dapat menghambat program.
2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan dapat menghambat program.
4. Keterbatasan sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, dapat menghambat program.

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dapat menghambat program.
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dapat menghambat program.
3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dapat menghambat program.
4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif dapat menghambat program.

Faktor Sosial Budaya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil dapat menghambat program.
2. Norma dan nilai sosial yang tidak mendukung program pencatatan sipil dapat

- menghambat program.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
 4. Kurangnya dukungan tokoh masyarakat dapat menghambat program.

Faktor Teknis

1. Keterbatasan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, dapat menghambat program.
2. Keterbatasan jaringan dan konektivitas dapat menghambat program.
3. Keterbatasan keamanan data dapat menghambat program.
4. Keterbatasan pemeliharaan sistem dapat menghambat program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf untuk mencapai target program.
2. Mengembangkan kemampuan staf dalam mengelola data pencatatan sipil dan menggunakan teknologi.
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, untuk mendukung program.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencatatan sipil, seperti kesadaran akan pentingnya pencatatan sipil.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Upaya Proses

1. Mengembangkan perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai target program.
2. Meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang pencatatan sipil.
3. Mengembangkan analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program.

Upaya Teknis

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk

- mendukung pengelolaan data pencatatan sipil.
2. Meningkatkan keamanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data.
 3. Mengembangkan pemeliharaan sistem yang efektif untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.
 4. Meningkatkan ketersediaan teknologi, seperti komputer dan jaringan, untuk mendukung program.

Upaya Sosial Budaya

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
 2. Mengembangkan norma dan nilai sosial yang mendukung program pencatatan sipil.
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencatatan sipil.
 4. Mengembangkan dukungan tokoh masyarakat untuk mempromosikan program pencatatan sipil.
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** mempunyai Indikator Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama, formula perhitungan indikator adalah Jumlah PD Provinsi dan sektor lain yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan dibagi Jumlah OPD Provinsi (26 PD) dan 9 sektor lain di kali 100%. Capaian indikator kinerja adalah 37% dari target sebesar 37,14%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebesar 5,57%.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting untuk memastikan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam mengelola data kependudukan.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti kantor, peralatan, dan teknologi informasi, untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, seperti kesadaran akan pentingnya pengelolaan data kependudukan.

3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan berjalan efektif.
2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Faktor Sosial Budaya

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
2. Norma dan nilai sosial yang mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Dukungan tokoh masyarakat untuk mempromosikan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat program.
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dapat menghambat program.
3. Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data kependudukan dapat menghambat program.
4. Birokrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menghambat program.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke informasi dan teknologi dapat menghambat program.
2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan dapat menghambat program.
4. Keterbatasan sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, dapat menghambat program.

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dapat menghambat program.
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dapat menghambat

program.

3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dapat menghambat program.
4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif dapat menghambat program.

Faktor Teknis

1. Keterbatasan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, dapat menghambat program.
2. Keterbatasan jaringan dan konektivitas dapat menghambat program.
3. Keterbatasan keamanan data dapat menghambat program.
4. Keterbatasan pemeliharaan sistem dapat menghambat program.

Faktor Sosial Budaya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dapat menghambat program.
2. Norma dan nilai sosial yang tidak mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dapat menghambat program.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
4. Kurangnya dukungan tokoh masyarakat dapat menghambat program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf untuk mencapai target program.
2. Mengembangkan kemampuan staf dalam mengelola data kependudukan dan menggunakan teknologi.
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, untuk mendukung program.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Upaya Proses

1. Mengembangkan perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai target program.
2. Meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang kependudukan.

3. Mengembangkan analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program.

Upaya Teknis

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.
2. Meningkatkan keamanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data.
3. Mengembangkan pemeliharaan sistem yang efektif untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan ketersediaan teknologi, seperti komputer dan jaringan, untuk mendukung program.

Upaya Sosial Budaya

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
 2. Mengembangkan norma dan nilai sosial yang mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
 4. Mengembangkan dukungan tokoh masyarakat untuk mempromosikan program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan mempunyai Indikator Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi, formula perhitungan indikator adalah Jenis dokumen penyajian data dibagi target penyajian data setiap tahun dikalikan 100%. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 sama dibandingkan dengan capaian Tahun 2023.

Faktor pendukung tercapainya target indikator program ini adalah :

Faktor Internal

1. Komitmen dan dukungan dari pimpinan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat penting untuk memastikan program pengelolaan profil kependudukan berjalan efektif.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, terlatih, dan berpengalaman dalam mengelola data kependudukan.
3. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti kantor, peralatan, dan teknologi informasi, untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.
4. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan program pengelolaan profil kependudukan.

Faktor Eksternal

1. Kebijakan dan peraturan yang mendukung program pengelolaan profil kependudukan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan profil kependudukan, seperti kesadaran akan pentingnya pengelolaan data kependudukan.
3. Kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
4. Ketersediaan teknologi informasi yang memadai, seperti sistem informasi manajemen, untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.

Faktor Proses

1. Perencanaan yang baik dan matang untuk memastikan program pengelolaan profil kependudukan berjalan efektif.
2. Pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan.
3. Analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program pengelolaan profil kependudukan.

Faktor Sosial Budaya

1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
2. Norma dan nilai sosial yang mendukung program pengelolaan profil kependudukan.
3. Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan profil kependudukan.
4. Dukungan tokoh masyarakat untuk mempromosikan program pengelolaan profil kependudukan.

Faktor penghambat tercapainya target indikator program ini adalah:

Faktor Internal

1. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur dapat menghambat program.
2. Kurangnya komitmen dari pimpinan dan staf dapat menghambat program.
3. Keterbatasan kemampuan staf dalam mengelola data kependudukan dapat menghambat program.
4. Birokrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menghambat program.

Faktor Eksternal

1. Keterbatasan akses ke informasi dan teknologi dapat menghambat program.
2. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan dapat menghambat program.
4. Keterbatasan sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, dapat menghambat program.

Faktor Proses

1. Kurangnya perencanaan yang baik dan matang dapat menghambat program.
2. Keterbatasan pengumpulan data yang akurat dan lengkap dapat menghambat program.
3. Kurangnya analisis data yang tepat dan efektif dapat menghambat program.
4. Keterbatasan penggunaan data yang efektif dapat menghambat program.

Faktor Teknis

1. Keterbatasan teknologi, seperti sistem informasi manajemen, dapat menghambat program.
2. Keterbatasan jaringan dan konektivitas dapat menghambat program.
3. Keterbatasan keamanan data dapat menghambat program.
4. Keterbatasan pemeliharaan sistem dapat menghambat program.

Faktor Sosial Budaya

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dapat menghambat program.
2. Norma dan nilai sosial yang tidak mendukung program pengelolaan profil kependudukan dapat menghambat program.
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program dapat menghambat program.
4. Kurangnya dukungan tokoh masyarakat dapat menghambat program.

Upaya kedepan agar indikator kinerja program dapat tercapai:

Upaya Internal

1. Meningkatkan komitmen pimpinan dan staf untuk mencapai target program.
2. Mengembangkan kemampuan staf dalam mengelola data kependudukan dan menggunakan teknologi.
3. Meningkatkan ketersediaan sumber daya, seperti anggaran dan infrastruktur, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kemajuan program.

Upaya Eksternal

1. Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pusat Statistik, untuk mendukung program.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan profil kependudukan.
3. Mengakses sumber daya eksternal, seperti dana dan teknologi, untuk mendukung program.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.

Upaya Proses

1. Mengembangkan perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai target program.
2. Meningkatkan pengumpulan data yang akurat dan lengkap tentang kependudukan.
3. Mengembangkan analisis data yang tepat dan efektif untuk mendukung pengambilan keputusan.
4. Meningkatkan penggunaan data yang efektif untuk mendukung kegiatan program.

Upaya Teknis

1. Mengembangkan sistem informasi manajemen yang efektif untuk mendukung pengelolaan data kependudukan.
2. Meningkatkan keamanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data.
3. Mengembangkan pemeliharaan sistem yang efektif untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan ketersediaan teknologi, seperti komputer dan jaringan, untuk mendukung program.

Upaya Sosial Budaya

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan data kependudukan dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari.
2. Mengembangkan norma dan nilai sosial yang mendukung program pengelolaan profil kependudukan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan profil kependudukan.
4. Mengembangkan dukungan tokoh masyarakat untuk mempromosikan program pengelolaan profil kependudukan.

Tabel 3. 23 Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Adminduk Tahun 2025

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil	80,08%	95,38%	119,11%

(Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi yang akurat dibagi 4 dan dikalikan 100% Realisasi = $(95,38/80,08) \times 100\%$ = 119,11%			
---	--	--	--

Tabel 3. 24 Perbandingan Cakupan Adminduk dengan Realisasi Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Realisasi	Realisasi Nasional	Ket
1.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	94,43%	81,97%	Di atas realisasi nasional

Tabel 3. 25 DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINDUK TAHUN 2025

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
-----	----------------------------------	------------

1.		<p>Kegiatan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2.		<p>Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik</p>
3.		<p>Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan</p>

3.7. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 26 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	74	-	-	9.129.790.220	8.437.168.364	92,41	692.621.856	Hasil evaluasi tahun 2025 tidak diperbandingkan dengan hasil tahun sebelumnya
2.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,23%	58,22%	99,98	411.928.350	328.197.150	79,67		

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,55	60,89%	97,35	496.773.350	308.427.658	62,09		
4.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,4%	79,05%	99,56%	40.559.500	39.576.200	97,58		
5.	Menurunnya angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,17%	2,18%	99,54%	383.086.400	332.460.885	86,78		

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	80,08%	95,38	119,11	468.713.000	405.038.579	86,42	102.922.439	
Total Belanja						10.930.850.820	9.850.868.836	90,12	102.922.439 (efisiensi) Efisiensi yang ditotal adalah indikator yang apabila kolom 6 mencapai 100% dan kolom 9 kurang dari 100% Dan bukan total seluruh kolom 10	

Sumber: <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Berdasarkan tabel III.6 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian belum melampaui target kinerja tahun 2025 karena capaian tersebut belum di rilis/dipublikasikan, dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 10.930.850.820, terealisasi Rp 9.850.868.836 atau 90,12% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 102.922.439 yang bersumber dari:

1. Sisa pengadaan barang dan jasa
2. Efisiensi belanja perjalanan dinas
3. Efisiensi honor narasumber
4. Efisiensi sewa tempat
5. Efisiensi biaya makanan dan minuman
6. Sisa belanja pegawai

3.8. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi.
- b. Aplikasi Pemetaan Lokasi Industri Rumahan (IR), untuk mengetahui persebaran industri rumahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. "Kemuning Cinta" (Kemudahan Akses untuk Peningkatan Capaian Pemanfaatan Kartu Identitas Anak).
- d. "Molin Sahabat" (Mobil Perlindungan Satu Hati untuk Semua Kerabat). Mobil perlindungan perempuan dan anak.

3.9. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung sebagai TOP 5 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik “KEMUNING CINTA” (Kemudahan Akses untuk Peningkatan Capaian Pemanfaatan Kartu Identitas Anak).

3.10. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel 3. 27 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 700/94/LHE/ITDA/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP tahun 2023 pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen IKU pada Perangkat daerah tidak bisa di nilai karena belum di Upload https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x 2. Pengukuran Kinerja dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. 3. Setiap unit/Satuan Kerja dan pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja 4. Setiap unit/Satuan Kerja dan pegawai supaya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja 5. Dokumen Laporan Kinerja supaya di Upload di dalam 	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaiantarget kinerja (output dan outcome) Tahun 2025 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupload Dokumen IKU ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x 2. Melaksanakan Rapat Internal 3. Melaksanakan Rapat Internal 4. Melaksanakan Rapat Internal 5. Mengupload Dokumen Laporan Kinerja ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x 6. Mengupload Informasi dalam Laporan Kinerja ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x 7. Mengupload Evaluasi

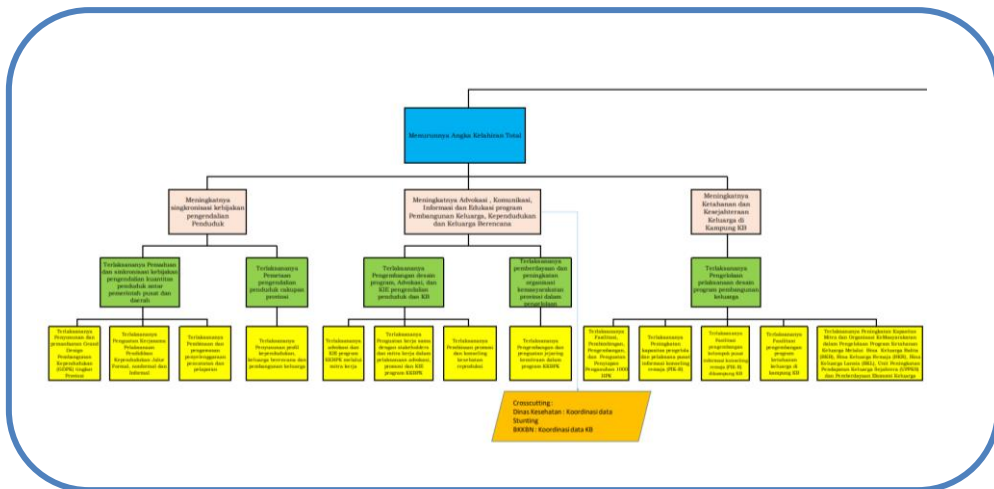
<p>https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>6. Informasi dalam Laporan Kinerja agar di Upload di dalam https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal supaya di Upload di dalam https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar di Upload di dalam https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>9. Implementasi SAKIP agar di Upload di dalam https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p>	<p>Akuntabilitas Kinerja Internal ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>8. Mengupload Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p> <p>9. Mengupload Implementasi SAKIP ke https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x</p>
---	---

Bukti dukung tindak lanjut atas rekomendasi diatas adalah sebagai berikut :

RENCANA AKSI TINDAKLANJUT REKOMENDASI LHE AKIP INTERNAL										
DINAS PEMBERDAYAAN PEREKULIAHAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUUK KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024										
NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	REALISASI				LINK DOKUMEN BUKTI DUKUNG
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	Dokumen K1 sudah terupload di sistem DIBK dan diupload ke sistem SIPIL	Mengupload dokumen ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	1 Maret s.d.30 Juni 2024	Selesai		√			https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	2 kali Report	Agustus-September 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	2 kali Report	Agustus-September 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan 2023 dan 2024 ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	2 kali Report	Agustus-September 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Dokumen laporan tahunan sudah diupload ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Dokumen laporan tahunan sudah diupload ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Dokumen laporan tahunan sudah diupload ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x
	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL	Mengupload laporan tahunan ke sistem SIPIL https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x	1 Bekerja	Agustus 2024	Selesai			√		https://drive.google.com/drive/folders/1WCRNsWjKrFbsqiQWpQizDFm0r9rA2e4x

Kantor Dinas Pemberdayaan Persekuliahlan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tahun 2024





Ket : Cross Cutting dapat dilihat melalui link : https://drive.google.com/file/d/1ic7nKnaC702WB5duVku14Nhw_8KsU4PB/view?usp=sharing

Bab 4 Berisi :

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi
3. Rencana Aksi

BAB 4

Penutup

3.1 Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 6 (enam) sasaran, terdapat 1 (indikator) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan tercapai dengan presentase 119,11%, namun untuk indikator kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tidak tercapai dengan presentase 97,35%.
2. Tidak tercapainya indikator kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dikarenakan adanya *penurunan pada tiga klaster yaitu klaster*

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan serta pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Akibat penurunan ini mengakibatkan Indeks Perlindungan (IPA) tidak dapat tercapai.

3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data Anak yang akurat, terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perlu kerja sama dengan instansi yang menangani permasalahan Anak, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari stakeholder untuk mendukung program kegiatan pada Dinas P3ACSKB dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran mereka.
2. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, komunitas, dan pemerintahan.
3. Meningkatkan akses kesehatan reproduksi bagi perempuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
4. Meningkatkan kesadaran dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui kampanye dan program-program pencegahan.
5. Meningkatkan Akses Ekonomi dan Keuangan: Meningkatkan akses ekonomi dan keuangan bagi perempuan untuk

meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan memulai usaha.

6. Meningkatkan Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
7. Meningkatkan kesadaran dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui kampanye dan program-program pencegahan.
8. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang perlindungan anak di kalangan masyarakat, keluarga, dan anak-anak itu sendiri.
9. Meningkatkan sistem perlindungan anak yang efektif dan efisien, termasuk sistem pelaporan, investigasi, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
10. Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak yang rentan dan berisiko.
11. Meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.
12. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang terkait dengan perlindungan anak.
13. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus kekerasan terhadap anak dan memastikan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak diadili dan dihukum.
14. Meningkatkan dukungan dan bantuan bagi korban kekerasan terhadap anak, termasuk layanan konseling, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.
15. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang keluarga

berencana di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pasangan usia subur.

16. Meningkatkan akses layanan keluarga berencana yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil dan terisolasi.
17. Meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang efektif dan aman bagi pasangan usia subur.
18. Meningkatkan peran laki-laki dalam keluarga berencana, termasuk dalam penggunaan metode kontrasepsi dan pengambilan keputusan tentang keluarga.
19. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
20. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap program pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.
21. Meningkatkan dukungan dan bantuan bagi pasangan usia subur dalam membuat keputusan tentang keluarga dan menggunakan metode kontrasepsi.
22. Meningkatkan kualitas data kependudukan melalui pengumpulan data yang akurat, lengkap, dan terkini.
23. Meningkatkan akses layanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat.
24. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
25. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi yang

- terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
26. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya.
 27. Meningkatkan dukungan dan bantuan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 28. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.

3.3 Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas P3ACSKB secara lebih intensif.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas P3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pembangunan Responsif Gender	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	53.4	54	54.33	54.67
2	Meningkatnya Kesejahteraan Anak	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66.07	66.87	67.67	68.47
		Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	73.24	73.94	74.64	75.34
3	Meningkatkan Peran keluarga dalam menekan laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2.4	2.37	2.32	2.3
		Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	76.37	79.11	81.85	84.58
4	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	74	-	-	-

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp : 0717 - 425517 Web : <http://dp3acskb.babelprov.go.id>
Fax : 0717 - 425517 email : dp3acskb@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 050/047 /DP3ACSKB/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA NOMOR: 050/1/DP3ACSKB/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DP3ACSKB
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Belitung tentang Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3ACSKB Tahun 2023, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tentang Indikator Kinerja Utama Dinas



Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;



10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mengubah ketentuan yang tercantum dalam lampiran, bahwa tabel Indikator Kinerja Utama pada kolom sasaran strategis "meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah" dan kolom Indikator kinerja "Indikator Nilai RB Perangkat Daerah" dihapus.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yakni mengubah Lampiran sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang

Pada tanggal : 6 November 2023



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
19660504-199512 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL					TARGET			Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung Jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52,59	53,4	54	54,3	54,67	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang - bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.	$IDG = \frac{I(Par) + I(DM) + I(nc-des)}{3}$ I(Par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(nc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan (Bidang PP)			
2.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	57,82	66,07	66,87	67,67	68,47	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot klaster ke-j Indeks Kj adalah nilai Indeks klaster ke-j.	Kepala Bidang Perlindungan Anak (Bidang PA)			

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung Jawab
			AWAL		TARGET					
1	2	3	Tahun 2022	2023	2024	2025	2026	9	10	11
3.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	73,26	73,24	73,94	74,60	73,24	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan Indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak yaitu Klaster V: perlindungan khusus.	$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak. W_i adalah Bobot Indikator ke-i SX_i adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p>	Kepala Bidang Perlindungan Anak (Bidang PA)
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,49	2,4	2,37	2,32	2,3	Totak Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya.	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu. i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.</p>	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Bidang PPKB)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL					Definisi	Formula Perhitungan (rumus menghitung realisasi target)	Bidang Penanggung Jawab
			Tahun 2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	78,92	76,37	79,11	81,85	84,58	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (kartu keluarga, kartu identitas anak) ditambah Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) ditambah Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama ditambah Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi dibagi 4 dan dikalikan seratus persen	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pejanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi yang akurat dibagi 4 dan dikalikan 100%	Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Bidang DUKCAPIL)

Ditetapkan di : Pangkalpinang
 Pada tanggal : 6 November 2023



DR. ASYRAF SORYADIN, M.Pd
 19660504 199512 1 002

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS P3ACSKB,

Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660504 199512 1 002



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA PERHITUNGAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	75	Berdasarkan PermenPAN RB No. 26 tahun 2020. Nilai PMPRB: 60% Komponen Pengungkit + 40% Komponen Hasil Perolehan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi DP3ACSKB oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	54,33 %	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-des)}{3}$ <p>I(par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(inc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.</p>
3.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	67,67 %	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot kluster ke-j Indeks Kj adalah nilai indeks kluster ke-j.</p>
4.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	74,64 %	$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak Wi adalah Bobot indikator ke-i SX_i adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p>

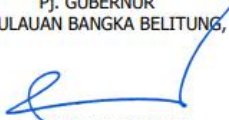
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA PERHITUNGAN TARGET
5.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,32 %	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur.</p> <p>ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu.</p> <p>i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.</p>
6.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	81,85 %	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi dibagi 4 dan dikalikan 100%.

Anggaran :

No	Indikator Kinerja	Program Eselon II	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp9.280.374.326	APBD TA. 2024
2.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp173.000.000	APBD TA. 2024
		2. Program Perlindungan Perempuan	Rp238.958.750	APBD TA. 2024

No	Indikator Kinerja	Program Eselon II	Anggaran	Keterangan
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp474.186.500	APBD TA. 2024
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp181.220.900	APBD TA. 2024
		2. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp761.500.000	APBD TA. 2024
4.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp64.000.000	APBD TA. 2024
5.	Total Fertility Rate (TFR)	1. Program Pengendalian Penduduk	Rp62.000.000	APBD TA. 2024
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp347.340.800	APBD TA. 2024
		3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp405.200.500	APBD TA. 2024
6.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp406.000.000	APBD TA. 2024
		2. Program Pencatatan Sipil	Rp443.000.000	APBD TA. 2024
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp347.000.000	APBD TA. 2024
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp67.500.000	APBD TA. 2024


PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

Pangkalpinang, Januari 2024

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS P3ACSKB,



Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660504 199512 1 002

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK-PERTAMA,
KEPALA DINAS P3ACSKB,


Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660504 199512 1 002



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA PERHITUNGAN TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	-	Permen. PAN-RB nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi di Unit Kerja sudah tidak ada lagi
2.	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	58,23%	$IDG = \frac{I(par) + I(DM) + I(inc-des)}{3}$ <p>I(par) adalah Indeks Keterwakilan perempuan di parlemen. I(DM) adalah Indeks Pengambilan Keputusan. I(inc-des) adalah Indeks Distribusi Pendapatan.</p>
3.	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62,55%	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ <p>IPHA adalah Indeks Perlindungan Anak W_j adalah Bobot kluster ke-j Indeks K_j adalah nilai indeks kluster ke-j.</p>
4.	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	79,40%	$IPKA = \sum_{i=1}^5 (W_i \times SX_i)$ <p>IPKA adalah Indeks Perlindungan Khusus Anak W_i adalah Bobot indikator ke-i SX_i adalah nilai indikator ke-i yang telah dinormalisasi.</p>
5.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	2,17%	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p>TFR adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. ASFR adalah Angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu.</p>



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FORMULA PERHITUNGAN TARGET
				i adalah kelompok usia 5 tahunan (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49) per 1000 wanita usia 15-49.
6.	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	80,08%	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA) + Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan) + Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan perjanjian kerjasama + Persentase penyediaan penyajian data kependudukan tingkat provinsi dibagi 4 dan dikalikan 100%.

Anggaran :

No	Indikator Kinerja	Program Eselon II	Anggaran	Keterangan
1.	Nilai RB Perangkat Daerah (DP3ACSKB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp9.148.203.768,14	APBD-P TA. 2024
2.	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp85.637.200,00	APBD-P TA. 2024
		2. Program Perlindungan Perempuan	Rp173.968.750,00	APBD-P TA. 2024
		3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp237.281.500,00	APBD-P TA. 2024
3.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	1. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp247.294.250,00	APBD-P TA. 2024
		2. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Rp442.233.300,00	APBD-P TA. 2024

No	Indikator Kinerja	Program Eselon II	Anggaran	Keterangan
4.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp40.559.500,00	APBD-P TA. 2024
5.	Total Fertility Rate (TFR)	1. Program Pengendalian Penduduk	Rp27.927.000,00	APBD-P TA. 2024
		2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp234.416.600,00	APBD-P TA. 2024
		3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Rp120.742.800,00	APBD-P TA. 2024
6.	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp128.555.300,00	APBD-P TA. 2024
		2. Program Pencatatan Sipil	Rp128.196.700,00	APBD-P TA. 2024
		3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp179.630.000,00	APBD-P TA. 2024
		4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp32.331.000,00	APBD-P TA. 2024

Pangkalpinang, November 2024

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS P3ACSKB,



Dr. ASYRAAS SURYADIN, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19660504 199512 1 002



Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 1 Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149

Telp : 0717 - 425517
Fax : 0717 - 425517

Web : <http://dp3acskb.babelprov.go.id>
email : dp3acskb@babelprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : BA-006/DP3ACSKB/TWI/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 22 April 2024



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	Triwulan I			Penanggung Jawab		
							Realisasi kinerja	%	Alasan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	persen	2,6	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Persentase kebijakan perlindungan perempuan 2. Persentase Perempuan Korban kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	1.100 2.100	1.0 2.0	1.0 2.0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dan UPTD PPA
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	44,98	0	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun
Meningkatnya pemenuhan hak terhadapa anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHAK)	Persentase peningkatan SDM Pemenuhan Partisipasi ANAK	persen	19,90	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak perempuan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Persentase Peningkatan SDM	persen	1.100 2.033	1.0 2.0	1.0 2.0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PERLINDUNGAN ANAK dan UPTD PPA	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	Triwulan I			Penanggung Jawab	
							Realisasi kinerja	%	Alasan		
				Perlindungan Anak							
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilih gender dan anak	persen	92,59	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pembiayaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota	persen	71,42	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pembiayaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota	persen	100	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEHATERA (KS)	persentase pembiayaan kampung KB	persen	83	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIA)	persen	99,8	0	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran pertambahan	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (akta lahir, akta mati, akta perkawinan)	persen	99,5	0	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL

NO	SARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	Realisasi Kinerja		Penanggung Jawab
							Realisasi	Alasan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROGRAM KOMUNITAS KEPENDUKUAN	Persentase perangkat daerah dan satuan yang melaksanakan perjanjian kerjasama	Persen	37,54	0	0	Progres Belum ada perjanjian kerjasama jika tahun 2024 2024 2024
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUKUAN	Persentase penyediaan informasi data kependudukan tingkat provinsi	Persen	100	0	0	Progres Belum ada perjanjian kerjasama jika tahun 2024 2024 2024



Lampiran 5. Laporan Money Rencana Aksi TW 2 Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA**

Jalan Pulau Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp : 0717 - 425517 Web : <http://dp3acskb.babelprov.go.id>
Fax : 0717 - 425517 email : dp3acskb@babelprov.go.id

BERITA ACARA

Nomor : BA-001/DP3ACSKB/TWII/2024

Pada hari ini Selasa , tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 10 Juli 2024


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
RACHA SURYADIN, M.Pd
Kepala Bidang Utama Madya
NIP. 19660504 199512 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	persen	54	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja modal APBD	persen	2,6	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan	1	1	1	100		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	Laporan	1	1	1	100		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	Orang	55	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1. Persentase kebijakan perlindungan perempuan 2. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	1. 100 2. 100	1. 0 2. 0	1. 0 2. 0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN / UPTD PPA
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	55	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Perempuan Korban Kekerasan yang ditangani	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat (UPTD PPA)	Orang	6	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	UPTD PPA
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	44,98	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	55	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

monev renaksi tw 2 - PDF24 Reader

5 / 27 71%

Search

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen	67,67	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHIA)	Persentase peningkatan SDM dalam Pemenuhan Partisipasi ANAK	persen	19,90	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PERLINDUNGAN ANAK
	Pelembagaan PHIA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pelembagaan PHIA	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK

Search

00:33

monev renaksi tw 2 - PDF24 Reader

6 / 27 71%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIMULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANGS)
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam tugas TUGAS KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	Perangkat Daerah	50	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Orang	70	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kegiatan	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK

Search 00:33

monev renaksi tw 2 - PDF24 Reader

7 / 27 71%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIMULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANGS)
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif 2. Persentase Peningkatan SOM Perlindungan Anak	persen	1.100 2.033	1.0 2.0	1.0 2.0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PERLINDUNGAN ANAK / UPTD PPA
	Perogkaan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengujian Kekerasan terhadap Anak	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan (program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Orang	70	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Bagi Anak	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	Orang	8	2	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	UPTD PPA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Bagi Anak	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di tritulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK

Search 00:33

money renaksi tw 2 - PDF24 Reader

8 / 27 71%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIKANG)
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota								
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Kegiatan	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
3	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	74,64	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PERLINDUNGAN ANAK
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian OPD yang menyediakan data pilah gender dan anak	persen	92,89	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PERLINDUNGAN ANAK
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PERLINDUNGAN ANAK
4	Meningkatnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	persen	81,85	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

00:34

money renaksi tw 2 - PDF24 Reader

9 / 27 71%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIKANG)
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUUK	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk (KK, KTP, KIK)	persen	89,8	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kab/kota yang mendapatkan supervisi	Persen	100	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang ditetapkan	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Stata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Stata Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen	6	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

00:34

NO	SABARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGULUNG JAWAB (BIDANG)
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admnduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	1) Persentase Cakupan Kemukiman Kartu Keluarga (KK), 2) Persentase Cakupan Kemukiman Kartu Tanda Penduduk (KTP), 3) Persentase Cakupan Kemukiman Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	99,2; 100; 65	0,0; 0	0,0; 0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Laporan	48	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Keperguruan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SABARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGULUNG JAWAB (BIDANG)
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Persen	100	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase masyarakat yang memiliki akta pencatatan sipil (Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan)	Persen	89,5	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase tabkoka yang mendapatkan supervisi	Persen	100	100	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penetapan Kebijakan Teknik di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknik di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemanfaatan Data atas Pensiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Pensiwa Penting	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Facilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admudit terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Admudit terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	1) Persentase Cakupan Akta Kelahiran; 2) Persentase Cakupan Akta Kematian; 3) Persentase Cakupan Akta Perkawinan	Persen	1. 98.5; 2. 100; 3. 100	1. 0; 2. 0; 3. 0	1. 0; 2. 0; 3. 0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Facilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Laporan	48	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan	12	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II				PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%	PENJELAJAN PROGRES TW II	
	Pemberian Konsultasi Penyenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase kabkota yang mendapatkan konsultasi	persen	100	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	4	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase perangkat daerah dan sektor lain yang mengadakan peajaran kerjasama	Persen	37,14	0,00	0,00	0	Progres dibitung pada akhir tahun	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pantauan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase kabkota yang mendapatkan supervisi	Persen	100	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II				PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%	PENJELAJAN PROGRES TW II	
	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perencanaan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perencanaan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah PD Provinsi dan sektor lain yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan	Perangkat Daerah	11	7	7	100		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2	2	100		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	2	1	1	100		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIVULAN II	
								PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (IBIDANG)
	Penyeleenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	13	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembentukan Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	12	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabkota yang menetapkan pembinaan dan pengawasan	Persen	100	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pembinaan dan Penguasaan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguasaan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	4	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan	Orang	28	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIVULAN II	
								PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (IBIDANG)
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyediaan penyalan data kependudukan tingkat provinsi	persen	100	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan Profil dan Data Kependudukan Skala Provinsi	Dokumen	3	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,32	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pembinaan Penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota	persen	71,42	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Jumlah dokumen pengendalian penduduk	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trivulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIMULAN II			PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Penduduk								
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Laporan	7	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Penetapan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian penduduk dan KB	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase pembinaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di kabupaten/kota	persen	100	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga	Jumlah dokumen KIE KKBPK	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIMULAN II			PENJELASAAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal								
	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Facilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Fasilitas Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Daerah	7	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA
	Pembudayaan dan Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Ber-KB	Jumlah dokumen pembudayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah provinsi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan kesehatan ber-KB	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di trisulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUJUK KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANG)
	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKSPK	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bargas Kencana)	Organisasi	32	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PS)	persentase pembinaan kampung KB	persen	63	0	0	0	Progres ditunggu pada akhir tahun	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Facilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi-Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi-Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi	21	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Pelaksanaan Fasilitas, Pengembangan, dan Penguatan Penyisipan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Pengembangan, dan Penguatan Penyisipan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi-Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi-Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok	50	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIK/ANG)
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah dokumen Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Facilitasi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitas Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/Kota	7	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Asesor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi	50	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
6	Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah (DP2AC/BK/B)	Nilai	75	0	0	0	Progres ditunggu pada akhir tahun	SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
(DPJACSKB)									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (DPJACSKB); 2. Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPTD PPA); 3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DPJACSKB)	Nilai	1. 76; 2. 76; 3. 74,5	0	0	0	Progres dihitung pada akhir tahun	SEKRETARIAT / UPTD PPA
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	9	3	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)	
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	2	5	250		SEKRETARIAT
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan	Nilai	76	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	53	53	42	79,25		SEKRETARIAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	6	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Nilai	76	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat/Bekal Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Alat/Bekal Kelengkapannya	Paket	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan II dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	Nilai	76	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum UPTD PPA	Nilai	76	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	UPTD PPA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (UPT PPA)	Paket	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3	3	100		SEKRETARIAT

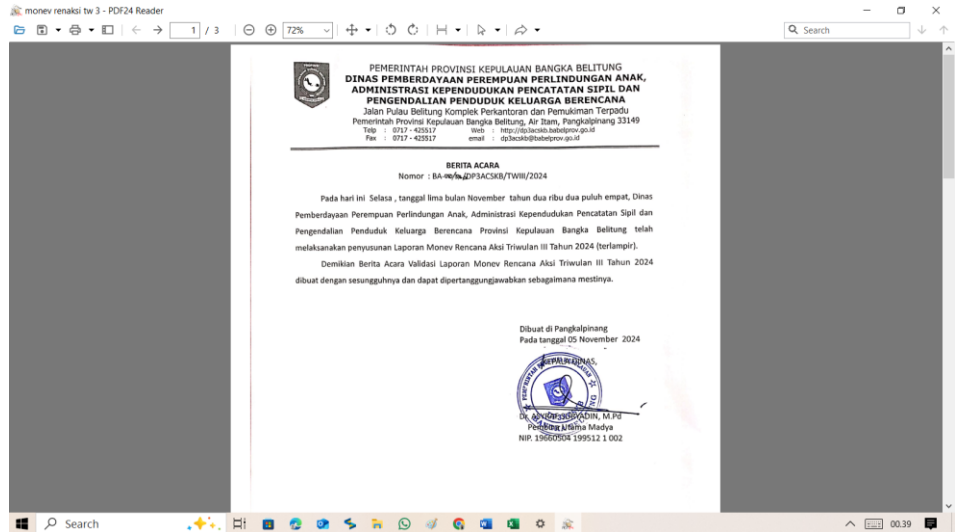
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW II	REALISASI TW II	%	TRIWULAN II	
								PENJELASAN PROGRES TW II	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6	3	2	66,67		SEKRETARIAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	2	2	100		SEKRETARIAT
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PPA)	Laporan	25	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	UPTD PPA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan pemerintah yang diadukan	Laporan	3	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	17	0	0	0	Kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV pada anggaran perubahan	SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIMULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	36	0	0	0	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	0	0	0	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	0	0	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	100	SEKRETARIAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan pemerintah yang dipelihara	Unit	12	0	0	0	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	Unit	2	0	0	0	SEKRETARIAT
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peranan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perannya	Unit	8	4	5	125	SEKRETARIAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIMULAN II			PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW II	REALISASI TW II	%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	62	25	20	80	SEKRETARIAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0	0	0	SEKRETARIAT


 Di Atas Mubtikan, M Fu
 Pemerintah Bengkulu
 NIP. 196004 19912 1 001

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 3 Tahun 2025




MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TARGET TW III	REALISASI TW III	%	PENJELASAN PROGRES TW III	TRIWULAN III	
									PERSENTASE ANGGARAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pembentayan gender (IDG)	persen	54	0	0	0	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	31,66%	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen	67,87	0	0	0	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	19,40%	PERLINDUNGAN ANAK
3	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	74,64	0	0	0	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	22,70%	PERLINDUNGAN ANAK


monev renaksi tw 3 - PDF24 Reader

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	TARGET	REALISASI	%	PENJELASAN PROGRES TW III	PERSENTASE ANDANGAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
				TW 2024	TW III	TW III				
4	Memangkahnya cakupan administrasi kependudukan	Persentase Cakupan Administrasi Kependudukan	persen	81,65	0	68,85	84,12	Realisasi dihitung dari persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak dibandingkan dengan persentase masyarakat yang memiliki Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan dan dibarengi dengan persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan pelatihan kerjasama serta ditambah dengan persentase penyediaan pengujian data kependudukan Ingot promosi kemudian dibagi empat dan dikalikan seratus persen	76,01%	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Menurunnya Angka Kematian Total	Total Fertility Rate (FFR)	persen	2,32	0	0	0	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau BKKIN	75,57%	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA


 DIREKTORAT KEPENDUDUKAN, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NIP. 19660504 199512 1 002

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi TW 4 Tahun 2025

monev renaksi tw 4 - PDF24 Reader




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK,
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
 Jalan Pulus Belitung Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
 Telp : 0717 - 425517 faks : 0717 - 425517 email : ds@laca@saibeb09ns.go.id

BERITA ACARA
 Nomor : BA-098/413 /DPSKSKB/TW IV/2024

Pada hari ini Selasa , tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 (terlampir).

Demikian Berita Acara Validasi Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.


Dibuat di Pangkalpinang
 Pada tanggal 31 Desember 2024


 KEPALA DINAS,

 DR. ADYRAE SURGUDIN, M.PH.D.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660204 199512 1 002

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN III			PENJELASAAN PROGRES TW III	PERSENTASE ANGGARAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW IV	REALISASI TW IV	%			
1	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Indeks Pemberdayaan gender (IDG)	persen	54	54,33	58,22	107,16	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	77,77%	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2	Meningkatnya pemenuhan hak terhadap anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	persen	67,67	67,67	60,89	89,98	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	60,26%	PERLINDUNGAN ANAK
3	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	persen	74,64	74,64	79,05	105,91	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau Kementerian PPA	97,58%	PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TH 2024	TRIWULAN III			PENJELASAAN PROGRES TW III	PERSENTASE ANGGARAN TW III	PENANGGUNG JAWAB (BIDANG)
					TARGET TW IV	REALISASI TW IV	%			
4	Meningkatnya capaian administrasi kependudukan	Persentase Capaian Administrasi Kependudukan	persen	81,85	81,85	95,38	116,53	Realisasi dihang dari persentase masyarakat yang memiliki kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak ditambah dengan persentase masyarakat yang memiliki Akta Lahir, Akta Mati, Akta Perkawinan dan ditambah dengan persentase perangkat daerah dan lembaga lain yang mengadakan sejouran kerjasama serta ditambah dengan persentase penyediaan layanan data kependudukan tingkat provinsi kemudian dibagi empat dan dikalikan seratus persen	78,46%	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Menurunnya Angka Kematian Total	Total Fertility Rate (TFR)	persen	2,32	2,32	2,18	108,03	Perhitungan Realisasi Indikator menunggu rilis dari BPS atau BKKBN	87,33%	PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS,

 DR. ARYAF SURYADIN, M.Pd
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660504 199512 1 002

Lampiran 5. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439313 FAX 434693

Pangkalpinang, 04 April 2024

Nomor : 700/ 94 /LHE/ITDA/2024
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
PANGKALPINANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja.

3. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif instansi pemerintah/unit kinerja yang mengimplementasikan SAKIP. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen, variabel-variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60 ✓
2.	Pengukuran Kinerja	30	22,50	19,80 ✓
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,30	7,50 ✓
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,00	13,75 ✓
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,41	65,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	B

4. Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Hasil evaluasi atas komponen "Perencanaan Kinerja" Menunjukkan nilai sebesar **24,60** dengan uraian penilaian sebagai berikut:

1) Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **5,40**.

Penilaian dilakukan atas keberadaan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.

- b) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.
- c) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- d) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- e) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- f) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Kesimpulan bahwa Perencanaan Kinerja telah tersedia

2) Dokumen Perencanaan telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **7,20**.

Penilaian dilakukan atas kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
- b) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- c) Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- d) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- e) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- f) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan namun mengalami perubahan.
- g) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), namun belum menantang dan realistis, target tahun 2023 dan tahun 2024 lebih rendah.
- h) Belum seluruh Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai disetiap level jabatan (*Cascading*).
- i) Masih terdapat perjanjian kinerja & target kinerja antar eselon 4 yang sama.
- j) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan kinerja.

Kesimpulan rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria SMART belum sepenuhnya untuk mencapai hasil.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **12,00**.

Penilaian dilakukan atas pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai.
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai.
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- d) Rencana Aksi Kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- e) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- f) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- g) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.
- h) Setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

Kesimpulan Dokumen SKP belum di analisa, Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, Hasil evaluasi atas komponen "Pengukuran Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **19,80** dengan uraian sebagai berikut:

1) Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **4,80**.

Penilaian dilakukan atas keberadaan pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- b) Belum terdapat definisi operasional.
- c) Belum terdapat SOP pengumpulan data operasional.

Kesimpulan bahwa pada perangkat daerah belum di upload definisi operasional dan belum adanya SOP pengukuran kinerja.

2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **4,50**.

Penilaian dilakukan atas kualitas pedoman pengukuran kinerja dengan kriteria antara lain:

- a) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
- b) Belum menyajikan data kinerja.
- c) Belum terdapat pengumpulan data kinerja.
- d) Belum tersedia laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- e) Belum tersedia Dokumen pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- f) Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan melalui teknologi informasi data tidak tersedia.
- g) Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) data tidak tersedia.

Kesimpulan bahwa Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward dan Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **10,50** dengan uraian sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- b) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- c) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi.
- d) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- e) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- f) Dokumen hasil Pengukuran Kinerja belum tersedia.
- g) Belum terdapat analisis efesiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.

h) Belum tersedianya Dokumen terkait pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap pengukuran kinerja.

Kesimpulan Dokumen terkait pengukuran kinerja tidak tersedia.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi atas komponen "Pelaporan Kinerja" menunjukkan nilai sebesar **7,50** dengan uraian sebagai berikut:

1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Hasil evaluasi atas sub kompenen ini menunjukkan nilai sebesar **1,50** dengan uraian sebagai berikut:

Dokumen Laporan Kinerja belum disusun.

2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan penyempurnaannya.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **2,25** dengan uraian sebagai berikut :

Dokumen Laporan Kinerja belum di susun sehingga tidak dapat menunjukan Pencapaian Kinerja serta Informasi perbaikan.

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas sub komponen ini menunjukkan nilai sebesar **3,75** dengan uraian sebagai berikut:

Laporan Kinerja belum disusun sehingga dapat menjelaskan terkait dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja. Hasil evaluasi atas komponen









**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Belitung Kelurahan Air Itam ☎0717 4255117 Pangkalpinang 33149